

## ANALISIS PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK AIR PERMUKAAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI UPPD KABUPATEN KARANGANYAR

Annisa Agustiningsih<sup>1</sup>, Rukmini<sup>2</sup>, Sri Laksmi Perdanawati<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia.

[agustiannsa@gmail.com](mailto:agustiannsa@gmail.com)<sup>1</sup>, [rukmini.stie.aas@gmail.com](mailto:rukmini.stie.aas@gmail.com)<sup>2</sup>, [laksmi.stie.aas@gmail.com](mailto:laksmi.stie.aas@gmail.com)<sup>3</sup>

Received: 23-07-2024

Revised: 01-08-2024

Approved: 20-08-2024

### ABSTRAK

Riset ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Air Permukaan terhadap pendapatan daerah di UPPD Kabupaten Karanganyar. Riset ini menggunakan metode kuantitatif yaitu dengan menuangkan data menjadi bentuk angka. Adapun dalam mendukung proses pengumpulan data, informasi dikumpulkan dengan mengacu pada data berwujud serta melakukan pengamatan terhadap penelitian yang telah dilakukan pada masa lampau. Adapun hasil analisis dalam riset ini ialah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menunjukkan adanya pengaruh terhadap pendapatan daerah, sedangkan Pajak Air Permukaan tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap pendapatan Daerah.

**Kata kunci :** Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pendapatan daerah

### PENDAHULUAN

Pungutan pajak yang diperoleh negara sebagai sumber primer perolehan keuangan di Indonesia. Oleh karenanya, titik tumpu dalam pembiayaan rumah tangga negara didorong oleh penerimaan pajak. Lebih dari 70% penerimaan negara didapatkan melalui pajak, jumlah ini digunakan untuk menanggung penyelenggaraan APBN serta penyelenggaraan dalam pembangunan nasional. Besarnya pendapatan pajak di Indonesia tak terlepas dari peran Direktorat Jenderal Pajak serta pemahaman dan ketaatan para Wajib Pajak.

Secara umum, pada pasal 1 ayat 1 menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang KUP, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan Pergub Jateng No. 19 Tahun 2022 Tentang Penghitungan DPP PKB dan BBNKB, Pajak Kendaraan Bermotor atau yang biasa disebut PKB ialah “pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”. wajib pajak PKB diwajibkan membayar kepada negara, karena menjadi faktor atau bentuk kontribusi yang wajib dilaksanakan, yang mana uang atas pungutan pajak tersebut nantinya dikelola oleh negara sebagai pembiayaan atas pembangunan infrastruktur serta layanan publik. Pajak ini berjenis Pajak Provinsi yang mana pemungutannya diatur oleh Gubernur provinsi setempat.

Menurut Berdasarkan Pergub Jateng No. 19 Tahun 2022 Tentang Penghitungan DPP PKB dan BBNKB, Definisi BBNKB ialah “pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan

yang terjadi karena jual-beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kepada badan usaha". Tarif pengenaan atas BBNKB dibagi menjadi 2 yaitu BBN I yang mana merupakan bea atas penyerahan orang pertama sebesar 12% dan BBN II merupakan bea atas penyerahan orang kedua dan seterusnya sebesar 1%. Kecuali yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (3) Pergub Jateng No. 19 Tahun 2022 dimana tarif pengenaan BBNKB sebesar 0% bagi kendaraan bermotor seperti, ambulans, damkar, serta pelayanan kebersihan milik Pempus, TNI, Polri dan Pemda.

Definisi air permukaan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perda Prov Jawa Tengah No. 4 Tahun 2013 Tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Provinsi Jawa Tengah adalah "semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat". Sedangkan arti dari PAP atas dasar Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah "pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan". Penetapan tarif pungutan atas PAP ditentukan oleh masing-masing peraturan daerah yang ditetapkan paling tinggi adalah sebesar 10% (Mardiasmo, 2019).

Merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, makna pendapatan daerah adalah "penambah kekayaan bersih suatu daerah yang dapat diakui haknya oleh pemerintah daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua pendapatan uang melalui rekening kas umum daerah yang dapat menjadi penambah ekuitas sebagai dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah".

Hasil riset (Hanifah et al., 2023) menunjukkan pengaruh parsial pada pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah dibuktikan dengan hasil t hitung sebesar 7,620 untuk pajak kendaraan bermotor dan 2,013 untuk bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan pajak air permukaan tidak menunjukkan pengaruh terhadap pendapatan daerah dibuktikan dengan hasil t hitung senilai -1,918. Namun, hasil riset (Delima, n.d.) menunjukkan adanya pengaruh pajak air permukaan terhadap pendapatan daerah yang dibuktikan dengan hasil uji t senilai 29,609.

Berdasarkan kedua hasil riset tersebut yang menunjukkan hasil yang berbeda, menjadikan alasan yang cukup kuat untuk melakukan riset dengan judul "Analisa Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Terhadap Pajak Daerah di UPPD Kabupaten Karanganyar".

## **METODE PENELITIAN**

Riset ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penuturan (Sugiyono, 2013) kuantitatif ialah data yang dituangkan menjadi bentuk angka maupun data angka yang diperoleh dari pengubahan bentuk sebuah data kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan kepustakaan. Riset ini dilaksanakan di kantor UPPD Kabupaten Karanganyar. Metode analisis data yakni :

1. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan. Keseluruhan data yang diperoleh di UPPD Kabupaten Karanganyar selama tahun 2019-2023 yang meliputi data pendapatan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak air permukaan.
2. Pengolahan dan penyajian data, data-data yang diperoleh akan diolah menggunakan system spss serta disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik.

3. Kesimpulan yaitu menganalisis hasil dari data yang telah diolah dan disajikan sebelumnya untuk menjadi sebuah kesimpulan.

### **Metode Analisis Data**

#### Statistik Deskriptif

Sederhananya, Statistik Deskriptif meringkas dan mendeskripsikan fitur-fitur yang relative mendasar namun penting dari sebuah Kumpulan data kuantitatif.

#### Uji Hipotesis

##### Regresi Linier Berganda

Penentuan dampak variabel yang selaras dengan keberadaan hipotesis, dilaksanakan menggunakan uji regresi linier berganda. Diperlukannya pengujian regresi linier berganda ini untuk mengkaji keterlibatan hubungan antara beberapa variabel bebas.

### **Uji kelayakan model**

Uji F merupakan uji statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis untuk memeriksa apakah varians dua populasi atau dua sampel sama atau tidak. Dalam uji f, data mengikuti distribusi f. Uji ini menggunakan statistik f untuk membandingkan dua varian dengan cara membaginya

#### Uji parameter individual

Uji-t adalah statistik inferensial yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua kelompok dan bagaimana keterkaitannya. Uji-t digunakan ketika kumpulan data mengikuti distribusi normal dan memiliki varian yang tidak diketahui

#### Koefisien berganda

- a. Koefisien determinasi, diberi label  $R^2$  atau  $r^2$  dan diucapkan "R kuadrat", dalam statistik, mewakili porsi Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik membuat beberapa asumsi utama. Uji ini memuat uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas

### **Uji Normalitas**

Uji normalitas memeriksa apakah data sampel berasal dari populasi yang mengikuti distribusi normal. Serta umumnya pengujian ini penting untuk memverifikasi apakah data pada penelitian dipastikan terdistribusi secara normal. Banyak metode statistik, seperti korelasi, regresi, uji-t, dan ANOVA, mengandalkan asumsi bahwa data mengikuti distribusi normal.

#### Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan terjadinya interkorelasi yang tinggi antara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi berganda. Multikolinieritas dapat menyebabkan hasil yang bias atau menyesatkan ketika peneliti dan analis mencoba menentukan cara paling efektif menggunakan setiap variabel independen untuk memprediksi atau memahami variabel dependen dalam model statistik.

### **Uji Autokorelasi**

Statistik Durbin-Watson menguji adanya autokorelasi pada kesalahan model regresi. Autokorelasi berarti kesalahan observasi yang berdekatan berkorelasi. Dalam kasus ini, regresi kuadrat terkecil mungkin meremehkan kesalahan standar koefisien, sehingga membuat prediktor tampak signifikan meskipun sebenarnya tidak signifikan. Misalnya, kesalahan model regresi data harga saham harian mungkin bergantung pada pengamatan masa lalu karena harga saham pada hari itu mempengaruhi harga saham pada hari berikutnya. Statistik Durbin-Watson (D)

bergantung pada urutan pengamatan (baris). Statistik Durbin-Watson menentukan apakah korelasi antara suku kesalahan yang berdekatan adalah nol.

### Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti penyebaran yang tidak merata. Dalam analisis regresi, kita berbicara tentang heterogenitas dalam konteks istilah sisa atau kesalahan. Secara khusus, heteroskedastisitas adalah perubahan sistematis dalam penyebaran residu pada rentang nilai yang diukur. Heterogenitas menjadi masalah karena regresi kuadrat terkecil biasa mengasumsikan bahwa semua nilai residu berasal dari populasi yang memiliki varian konstan (homogenitas). Untuk memenuhi asumsi regresi dan yakin dengan hasilnya, residu harus memiliki varian yang konstanta. varians dalam variabel terikat yang dapat diperkirakan dari variabel bebasnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### STATISTIK DESKRIPTIF

Tabel 1 hasil uji statistik deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
PKB	60	8222547900	18000000000	12436000000	2406139056
BBNKB	60	2530355000	10100000000	6593919187	1503812857
PAP	60	4980175,00	82846335,00	32207925,12	8874115,696
PD	60	13000000000	23900000000	19332000000	3039163738
Valid N	60				

Data diolah tahun 2024

Rerata pendapatan PKB, BBNKB, PAP, serta PD selama kurun waktu 2019-2023 adalah sebesar Rp 12.436.000.000, Rp 6.593.919.187, Rp 32.207.925,12, Rp 19.332.000.000 dengan pendapatan terendah yang pernah diperoleh pada tahun diatas sebesar Rp 8.222.547.900, Rp 2.530.355.000, Rp 4.980.175, Rp 13.000.000.000 serta pendapatan tertinggi yang diperoleh dalam kurun waktu tersebut adalah Rp 18.000.000.000, Rp 10.100.000.000, Rp 82.846.335, Rp 23.900.000.000 dan standar deviasi sebesar Rp 2.406.139.056, Rp 1.503.812.857, Rp 8.874.115,696, dan Rp 3.039.163.738.

### UJI ASUMSI KLASIK

#### UJI NORMALITAS

Table 2 hasil uji normalitas

		Unstandarized Residual
N		60
Normal Parameters	Mean	0,0000011
	Std. Deviation	153624621,529
Most Extreme Difference	Absolut	0,085
	Positive	0,046
	Negative	-0,085
Konmogorov-Smirnov Z		0,085
Assymp. Sig. (2-tailed)		0,200

Nilai Konmogorov-Smirnov ialah 0,085 serta nilai Assym, sig atau nilai signifikasinya 0,200 maknanya nilai tersebut melebihi dari 0,05, sehingga ditarik

kesimpulan bahwa data didistribusikan secara normal dikarenakan nilai signifikansi melebihi daripada kriteria.

#### UJI MULTIKOLINIERITAS

Tabel 3 hasil uji multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PKB	0,913	1,095
BBNKB	0,989	1,011
PAP	0,920	1,087

Data diolah tahun 2024

*Tolerance value* yang didapat adalah 0,913 untuk PKB, 0,989 untuk BBNKB, serta 0,920 untuk Pajak Air Permukaan. Nilai tersebut lebih dari kriteria pengujian yaitu nilai *tolerance value* sudah melebihi 0,10 sehingga kesimpulan yang diperoleh dari model regresi ini, bahwa secara *tolerance value* tidak terjadi gejala multikolinearitas. Untuk nilai VIF berdasarkan tabel di atas adalah senilai 1,095 untuk PKB, 1,011 untuk BBNKB, serta 1,087 untuk Pajak Air Permukaan. Nilai tersebut telah sesuai dengan kriteria pengujian yaitu nilai tidak lebih dari 10,00 sehingga model regresi secara VIF gejala multikolinearitas tidak timbul.

#### UJI AUTOKORELASI

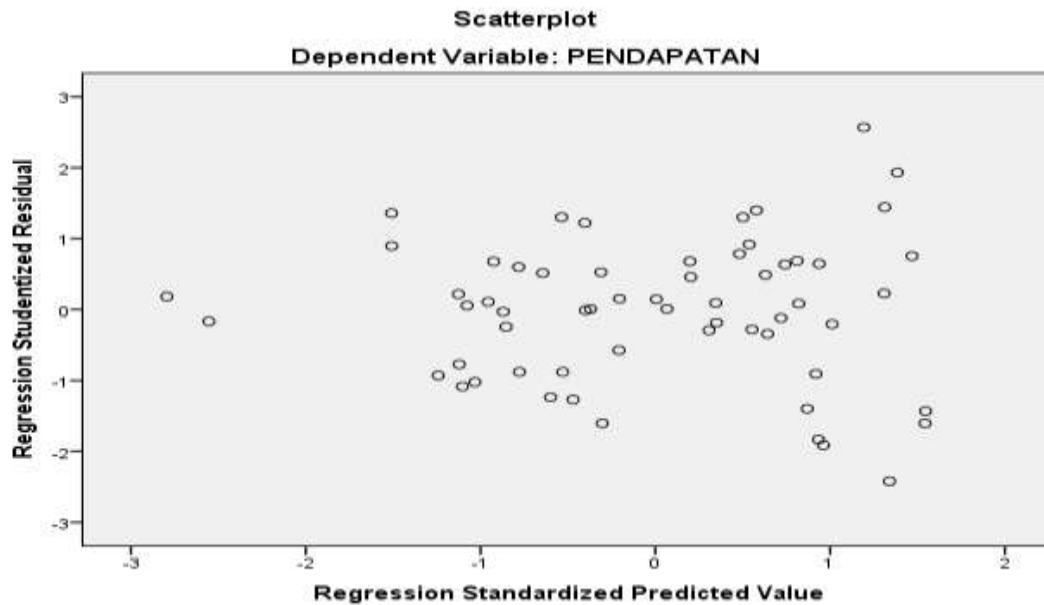
Table 4 hasil uji autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,999	0,997	0,997	157685884,415 76	1,236

Data diolah tahun 2024

Nilai Durbin-Watson (DW) dari perolehan data yang diolah adalah 1,236. Dan diketahui bahwa  $n = 60$  dan  $k = 3$ , sehingga ditemukan DU senilai 1,6889 serta 4-DU senilai 2,3111. Dengan demikian artinya  $DW < DU$  atau dengan nilai  $1,236 < 1,6889$  sehingga kesimpulan dari hasil uji regresi ini dapat terjadi autokorelasi.

#### UJI HETEROSKEDASTISITAS



Gambar 1 hasil uji heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 1 dilihat persebaran titik-titik dalam uji heteroskedastisitas merata baik dalam sumbu X maupun sumbu Y khususnya pada titik 0. Atas dasar tersebut, dapat menarik kesimpulan dari pengujian spss tersebut adalah data tersebar dengan baik dan tidak ada gejala heterokedastisitas.

## UJI HIPOTESIS

Analisa regresi linier berganda

Tabel 5 hasil analisis regresi linier berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
Constant	-301049595,415	144470243,901		-2,084	0,042
PKB	1,020	0,009	0,807	114,213	0,000
BBNKB	1,051	0,014	0,520	76,579	0,000
PAP	0,633	2,412	0,002	0,263	0,794

Data diolah tahun 2024

Persamaan regresi yang dapat diuraikan atas dasar olahan tabel diatas adalah :  
Pendapatan Daerah = -301049595,415 + 1,020 PKB + 1,051 BBNKB + 0,633 PAP + e

## Uji kelayakan model

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

Regression	5435620263942	3	18118734213143	7286,890	0,000
	97400000,000		2460000,000		
Residual	1392430936062	56	24864838143981		
	976000,000		716,000		
Total	5449544573303	59			
	60300000,000				

Data diolah tahun 2024

Dari angka- angka yang ditunjukkan tabel 5 tersebut dapat dilihat bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 7286,890 > 2,769. Serta *sig. value* senilai 0,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian menggunakan model ini layak dilanjutkan.

### Uji Signifikasi Parameter Individual

Tabel 6 hasil Signifikasi Parameter Individual

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
Constant	-	144470243,901		-2,084	0,042
	30104				
	9595,4				
	15				
PKB	1,020	0,009	0,807	114,213	0,000
BBNKB	1,051	0,014	0,520	76,579	0,000
PAP	0,633	2,412	0,002	0,263	0,794

Data diolah tahun2024

- 1) Dari tabel 6 tersebut, nilai yang diperoleh t hitung atas pajak kendaraan bermotor senilai 114,213 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung 114,213 > t tabel 1,673 maka H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima, yang berarti pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah.
- 2) Dari tabel 6 di atas, nilai yang diperoleh t hitung atas bea balik nama kendaraan bermotor senilai 76,579 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung 76,579 > t tabel 1,673 maka H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima, yang berarti bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah.
- 3) Dari tabel 6 di muka, nilai yang diperoleh t hitung atas Pajak Air Permukaan sebesar 0,263 dengan nilai signifikansi senilai 0,794. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung 0,263 < t tabel 1,673 maka H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini ditolak, yang berarti pajak air permukaan tidak berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

### Uji Koefisien Determinasi

Table 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
-------	---	----------	-----------------	----------------------------

1	0,999	0,997	0,997	157585884,41576
---	-------	-------	-------	-----------------

Data diolah tahun 2024

Nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (adjusted R<sup>2</sup>) sebesar 0,997 artinya 99,7%. Nilai tersebut memiliki arti bahwa variabel X (independen) yaitu PKB, BBNKB dan PAP memberikan pengaruh secara bersama-sama sebesar 99,7% terhadap variabel Y (dependen) yaitu Pendapatan Daerah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data uji statistic deskriptif, uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis pada seluruh data pendapatan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan serta data perolehan pendapatan daerah di UPPD Kabupaten Karanganyar selama tahun 2019-2023 dapat ditarik Kesimpulan bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan daerah karena memiliki kontribusi yang paling besar terhadap pendapatan daerah dengan nilai rata-rata sebesar Rp 12.436.000.000, bea balik nama kendaraan bermotor memiliki pengaruh yang cukup dikarenakan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah dengan pendapatan rata-rata Rp 32.207.925,12. Sedangkan pajak air permukaan tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan daerah karena selama kurun waktu 2019-2023 pajak ini memberikan kontribusi yang sangat kecil dengan rata-rata pendapatan hanya sebesar Rp 32.207.925,12 bagi pendapatan daerah di UPPD Kabupaten Karanganyar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Delima, P. (n.d.). *Pengaruh Penerimaan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan PENDAHULUAN Diera diterapkannya otonomi daerah diindonesia berlaku pada 1-01-2001 dengan maksud daerah bisa berusaha lebih optim.* 248-262.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM SPSS 25.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanifah, N., Nurmilah, R., Tanjung, H., Sukabumi, U. M., Balik, B., Kendaraan, N., Permukaan, A., & Daerah, P. A. (2023). *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB ), Dan Pajak Air Permukaan ( PAP ) Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Di Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah ( PPPDW ) Kota Sukabumi.* 2, 1-13.
- Islami, D., & Rahmawati, L. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. *OECOMICUS Journal of Economics*, 4(2), 169-179. <https://doi.org/10.15642/oje.2020.4.2.169-179>
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN-Edisi Terbaru.* Penerbit Andi.
- Nugrahwati, R. E., Marwoto, P. B., & Mulyani, H. T. S. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Keuangan (Jabk), Stie Ibe,* 5(2), 41-50. <http://jurnal.manajemen.upb.ac.id>
- Nur Raihanah Zalikhah, Syamsul, & Chaeranti Muldayani Dewi. (2023). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Kontribusinya terhadap PAD Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(7), 773-788. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i7.3856>

- Pendapatan, P. (2023). *1,2 1, 2. 12(6)*, 3523–3532.
- Pontoh, I. F., Ilat, V., & Warongan, J. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 9(1), 118–127. <https://doi.org/10.35800/jjs.v9i1.20076>
- Rahmat, Z. P. K., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Periode 2018-2020). *Bandung Conference Series: Accountancy, Vol. 2*, 231–237. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSA/article/view/1233>
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*.  
*rina widya*. (n.d.).
- Rizal, Y., & Hidayah, M. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 84–91. <https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.464>
- Saadah, L., Alfanningtias, A., Andiani, L., & Mufarokhah, N. (2023). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 16(1). <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v16i1.917>
- Saputra, A. N., & Kusumastuti, R. (2023). Jurnal Ekonomi Akuntansi. *Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Tangerang, V(Persediaan)*, 1–12. [www.depkeu.com](http://www.depkeu.com)
- Savitri, N. G., & Anggraeni, A. Y. (2021). Analisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2013 - 2019. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v3i1.6574>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Universitas, R., & Tegal, P. (2020). *View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk*.
- Valianti, R. M., Salmah, N. N. A., & Vicki, Y. (2023). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah pada Pendapatan Asli Daerah di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Innovative: Journal Of Social ...*, 3, 1995–2003. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5070%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/5070/3575>
- Wulandari, R. P.; Putri, R. D.; Wahyuni, L. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(5), 2189–2206.